

Transformasi Kekuasaan dan Kebudayaan di Era Umayyah: dari Arabisasi Hingga Pusat Peradaban Damaskus

Rina Fauziah Jufri

UIN Alauddin Makassar

rinafauziahjufri@gmail.com

Abstract. The Umayyad dynasty (661-750 AD) was an important milestone in the early history of Islamic civilization that underwent a major transformation from an elective caliphate system to a centralized hereditary monarchy. This research aims to examine historically the transformation of power and cultural policies during the Umayyad period, especially related to Arabization, Islamization, and the role of Damascus as the center of Islamic civilization. The method used is a qualitative-descriptive approach with literature study techniques from relevant sources. The results showed that the Arabization policy, which included the uniformity of administrative language and bureaucratic system, played a major role in building the political and cultural unity of Muslims. Meanwhile, the Islamization process expanded the influence of Islam to Asia, Africa and Europe, as well as creating social dynamics between Arab and non-Arab Muslims (mawali). Damascus developed into a cosmopolite cultural center through the acculturation of Arabic, Byzantine and Persian cultures. This transformation laid the foundation for an inclusive and multicultural global Islamic civilization.

Keywords: Umayyad Dynasty, Arabization, Islamization, History of Islamic Civilization

Abstrak. Dinasti Umayyah (661–750 M) merupakan tonggak penting dalam sejarah awal peradaban Islam yang mengalami transformasi besar dari sistem khilafah elektif menjadi monarki hereditas terpusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara historis transformasi kekuasaan dan kebijakan kebudayaan pada masa Bani Umayyah, khususnya terkait Arabisasi, Islamisasi, dan peran Damaskus sebagai pusat peradaban Islam. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif-deskriptif dengan teknik studi pustaka dari sumber-sumber yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Arabisasi, yang mencakup penyeragaman bahasa administrasi dan sistem birokrasi, berperan besar dalam membangun kesatuan politik dan budaya umat Islam. Sementara itu, proses Islamisasi memperluas pengaruh Islam ke wilayah Asia, Afrika, dan Eropa, sekaligus memunculkan dinamika sosial antara Muslim Arab dan non-Arab (mawali). Damaskus berkembang menjadi pusat

kebudayaan kosmopolit melalui akulturasi budaya Arab, Bizantium, dan Persia. Transformasi ini menjadi fondasi bagi peradaban Islam global yang inklusif dan multikultural.

Kata Kunci: Dinasti Umayyah, Arabisasi, Islamisasi, Sejarah Peradaban Islam.

Pendahuluan

Sejak berdirinya Dinasti Umayyah (661–750 M), pemerintahan Islam mengalami transformasi mendalam dari sistem khilafah elektif menjadi monarki hereditas yang terpusat, dengan Damaskus sebagai ibu kota baru. Perubahan ini tidak hanya menyangkut struktur politik, tetapi juga berdampak pada kebijakan administrasi, budaya, dan agama. Konsolidasi kekuasaan ini berlangsung beriringan dengan kebijakan besar seperti Arabisasi dan Islamisasi, yang membentuk identitas kolektif umat Islam dan meletakkan fondasi bagi peradaban global.¹

Pemindahan ibu kota ke Damaskus menjadikan kota tersebut pusat pemerintahan sekaligus laboratorium budaya inter-etnis. Di sinilah budaya Arab berasimilasi dengan tradisi Byzantium, Persia, dan lokal. Perpaduan ini tercermin dalam bidang arsitektur, seni, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, pembangunan Masjid Umayyah menyerap elemen struktural Romawi dan Suriah, memperlihatkan akulturasi budaya yang kaya.² Selain itu, perkembangan tasawuf, ilmu hukum, dan pendidikan agama merupakan bentuk nyata dinamika spiritual dan intelektual masyarakat, mampu hidup harmonis di tengah latar etnis yang beragam.³

Arabisasi yang digulirkan kalifah seperti Abdul Malik bin Marwan memperkuat peran bahasa Arab sebagai bahasa penguasa dan budaya. Institusionalisasi dokumen, mata uang, serta administrasi pusat berbasis bahasa Arab memperkuat identitas politik dan religi, sekaligus menyatukan masyarakat multi-etnis di bawah satu sistem administrasi yang kohesif.⁴ Sementara itu, proses Islamisasi membuka ruang bagi

¹L. Wati and M. Amril, "Dinamika Politik, Ekonomi, Dan Administrasi Dinasti Umayyah," *Takwana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora* 4(1) (2024): 1–15.

²fadil munawar Manshur, "Pertumbuhan Dan Perkembangan Budaya Arab Pada Masa Dinasti Umayyah," *Humaniora* 15, no. 2 (2022): 172–80, <https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/785/630>.

³Syah Ahmad Qudus Dalimunthe dan Syawaluddin Nasution, "Dinamika Spiritual Islam Pada Masa Dinasti Umayyah," *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023): 16466.

⁴Isma Aulia Zamaakh Syari and Meyniar Albina, "Multikulturalisme Pada Masa Dinasti Umayyah," *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2024): 244–48.

mawālī (non-Arab) untuk menjadi bagian dari komunitas Islam, meskipun awalnya mereka masih dipinggirkan secara sosial, sebuah fenomena yang menciptakan ketegangan dan mendorong koreksi sosial secara bertahap.⁵

Dinamika ini mendapat perhatian akademis dari beberapa studi terkini. Misalnya, Dalimunthe & Nasution (2023) membedah kontribusi tasawuf dan ilmu dalam membentuk spiritualitas kolektif di masa Umayyah.⁶ Wati & Amril (2024) menyoroti kebijakan administratif dan ekonomi Bani Umayyah, termasuk penunjukan amir, reformasi pajak, serta sistem pos dan intelijen yang memfasilitasi kendali pusat dan mobilitas budaya.⁷ Sementara itu, Nuryati et al. (2024) memetakan bagaimana struktur birokrasi dan bahasa Arab menjembatani perluasan wilayah dan keberagaman sosial.⁸

Secara keseluruhan, kajian-kajian tersebut menggambarkan betapa Dinasti Umayyah telah memainkan peran penting dalam membentuk peradaban Islam awal. Akar dari administrasi pusat, patro kebudayaan kosmopolit, penyebaran agama, dan integrasi sosial yang inklusif, semua tumbuh dalam dekade pemerintahan Bani Umayyah. Meskipun sistem mereka tidak lepas dari konflik, terutama ketegangan antara Arab dan mawālī, serta tekanan dari kelompok oposisi; namun kerangka administratif dan budaya yang dihasilkan menjadi warisan penting yang kemudian disempurnakan oleh Dinasti Abbasiyah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian historis (sejarah) yang bertujuan untuk mengkaji dan merekonstruksi proses transformasi kekuasaan dan kebudayaan Islam pada masa Dinasti Umayyah, khususnya dalam konteks kebijakan Arabisasi serta perkembangan peradaban Damaskus sebagai pusat kekuasaan.

Dalam studi ini, peneliti menekankan pada penelusuran sumber-sumber yang relevan dengan periode Umayyah (661–750 M). Sumber utama yang dikaji meliputi karya-karya klasik sejarah Islam yaitu *Tarikh al-Tabari*, *al-Bidayah wa al-Nihayah* karya Ibn Katsir. Sementara itu,

⁵Nuryati et al., “Membangun Peradaban Peran Dinasti Bani Umayyah Dalam Pembentukan Sejarah Awal Islam,” *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner* 8, no. 12 (2024): 2118–7303.

⁶Nasution, “Dinamika Spiritual Islam Pada Masa Dinasti Umayyah.”

⁷Wati and Amril, “Dinamika Politik, Ekonomi, Dan Administrasi Dinasti Umayyah.”

⁸Nuryati et al., “Membangun Peradaban Peran Dinasti Bani Umayyah Dalam Pembentukan Sejarah Awal Islam.”

sumber lainnya meliputi buku-buku akademik, jurnal ilmiah, dan artikel penelitian terkini yang membahas transformasi kekuasaan, politik Arabisasi, dan budaya pada masa Umayyah.

Isi/ Pembahasan

Struktur Pemerintahan

Setelah wafatnya Khalifah Ali bin Abi Thalib pada bulan Ramadhan tahun 40 H, putranya, Hasan bin Ali diangkat sebagai khalifah oleh penduduk Kufah. Meskipun Hasan dikenal sebagai cucu tercinta Rasulullah dan memiliki kontribusi dalam berbagai ekspedisi militer, ia lebih menyukai kehidupan yang tenang dan bersahaja dibandingkan politik dan kekuasaan. Ketika terjadi konflik dengan Muawiyah bin Abi Sufyan yang telah lama menguasai wilayah Syam dengan dukungan militer yang kuat dan keuangan yang stabil Hasan memilih berdamai daripada melanjutkan pertumpahan darah.⁹ Langkah ini ia ambil demi menjaga persatuan umat Islam, dan pada tahun 41 H/661 M, ia menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah. Tahun ini dikenal sebagai *Am al-Jama'ah* (Tahun Persatuan), menandai bersatunya umat Islam di bawah satu kepemimpinan.¹⁰

Muawiyah bin Abi Sufyan dikenal sebagai tokoh politik yang cerdas dan berpengalaman, terbukti dari pengabdianya sebagai gubernur Syam selama dua dekade dan kemudian menjadi khalifah selama 20 tahun. Setelah menerima bai'at dari Hasan dan penduduk Kufah, Muawiyah mendirikan Daulah Umayyah, dinamai dari leluhurnya Umayyah bin Abd Syams. Pemerintahan ini berlangsung selama kurang lebih 90 tahun (661–750 M/40–132 H) dan dipimpin oleh 14 khalifah. Daulah Umayyah mengalami tiga fase utama: masa pertumbuhan, masa kejayaan, dan masa kemunduran.¹¹ Meski awalnya Muawiyah menyetujui syarat-syarat perjanjian damai dengan Hasan, ia kemudian menetapkan sistem monarki dengan mengangkat putranya Yazid sebagai penerus, melanggar kesepakatan awal dan memulai tradisi pewarisan kekuasaan turun-temurun dalam pemerintahan Islam.¹²

⁹Hasan Ibrahim Hasan, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam* (Jakarta: Kalam Mulia, 2006).

¹⁰Hugh Kennedy, "The Prophet and the Age of The Caliphates," *Pearson Education*, 2004.

¹¹H. Kennedy, *The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century*, *Pearson Education*, 2004.

¹²Hasan, *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*.

Khalifah sebagai Pusat Kekuasaan

Khalifah dalam pemerintahan Bani Umayyah merupakan pemimpin absolut yang memiliki kekuasaan penuh dalam bidang politik, militer, hukum, dan agama.¹³ Ia berperan sebagai kepala negara sekaligus kepala agama, dan kekuasaannya diwariskan kepada keturunannya. Pemusatan kekuasaan ini menyebabkan khalifah memiliki otoritas yang sangat besar tanpa pembatasan sistem *checks and balances*. Berikut nama-nama khalifah yang pernah menjabat pada masa Bani Umayyah.¹⁴

No	Nama Khalifah	Masa Pemerintahan	Keterangan Singkat
1	Muawiyah bin Abu Sufyan	661–680 M	Pendiri dinasti, memindahkan ibu kota ke Damaskus.
2	Yazid bin Muawiyah	680–683 M	Terjadi peristiwa Karbala (kematian Husain bin Ali).
3	Muawiyah II	683–684 M	Pemerintahan singkat, wafat tanpa penerus.
4	Marwan bin al-Hakam	684–685 M	Awal Marwanid, memulihkan stabilitas.
5	Abdul Malik bin Marwan	685–705 M	Melakukan reformasi administrasi dan arabisasi.
6	Al-Walid bin Abdul Malik	705–715 M	Ekspansi besar ke Spanyol dan India.
7	Sulaiman bin Abdul Malik	715–717 M	Pemerintahan singkat.
8	Umar bin Abdul Aziz	717–720 M	Dikenal adil, promawali, disamakan dengan Khulafaur Rasyidin.
9	Yazid II	720–724 M	Meneruskan kebijakan

¹³Muhammad Sapii Harahap, “Sejarah Dinasti Bani Umaiyah Dan Pendidikan Islam,” *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2020): 21, <https://doi.org/10.51590/waraqat.v4i2.86>.

¹⁴M.Ag. Dr. Siti Zubaidah, *Sejarah Peradaban Islam*, ed. M.A Dr. Nurika Khalila Daulay, *Sejarah Peradaban Islam*, vol. 1 (PERDANA PUBLISHING, 2016).

			perluasan wilayah.
10	Hisham bin Abdul Malik	724-743 M	Memimpin dengan stabil, tapi mulai muncul konflik.
11	Al-Walid II	743-744 M	Dianggap lalai, masa awal kemunduran.
12	Yazid III	744 M	Mempersingkat masa jabatan Al-Walid II.
13	Ibrahim bin al-Walid	744 M	Pemerintahan sangat singkat.
14	Marwan II	744-750 M	Khalifah terakhir, dikalahkan oleh revolusi Abbasiyah.

Table 1. Nama-nama khalifah

Struktur Administrasi dan Lembaga Pemerintahan

Untuk mendukung jalannya pemerintahan di wilayah yang sangat luas, Dinasti Umayyah membentuk sistem birokrasi terorganisasi dengan berbagai lembaga, antara lain sebagai berikut.¹⁵

1. *Diwan al-Kharaj*: Mengurus urusan keuangan dan pajak.
2. *Diwan al-Jund*: Mengatur urusan militer dan pembagian gaji tentara.
3. *Diwan al-Barid*: Layanan pos dan intelijen negara.
4. *Diwan al-Rasa'il*: Mengatur surat-menyurat resmi negara.
5. *Diwan al-Khatam*: Bertugas menyegel dan mengarsipkan dokumen penting.

Pembagian Wilayah dan Pengangkatan Gubernur

Wilayah kekuasaan Islam pada masa Dinasti Umayyah mencapai cakupan geografis yang sangat luas, membentang dari Al-Andalus (Spanyol) di barat hingga perbatasan India di timur. Luasnya wilayah ini menuntut sistem pemerintahan yang terorganisasi dan terpusat. Oleh karena itu, khalifah menunjuk gubernur atau amir untuk memimpin setiap provinsi. Para gubernur memiliki tanggung jawab penting dalam memungut pajak (*kharaj* dan *jizyah*), menjaga stabilitas keamanan, dan

¹⁵Saidatul Husna Harahap et al., "Perkembangan Peradaban Islam Pada Dinasti Bani Umayyah," *Tabayyun* 2, no. 1 (2024): 184-99.

menegakkan hukum Islam di daerah kekuasaan masing-masing¹⁶. Meskipun diberikan wewenang administratif yang cukup besar, para gubernur tetap berada di bawah pengawasan langsung khalifah dan harus secara rutin melapor ke pusat pemerintahan di Damaskus. Hal ini menciptakan sistem desentralisasi administratif namun sentralisasi politik, di mana keputusan strategis tetap berada di tangan khalifah. Pengawasan ini dilakukan melalui jalur komunikasi resmi negara, termasuk melalui sistem pos dan utusan khusus yang dibentuk pada masa pemerintahan Khalifah Abdul Malik bin Marwan.¹⁷

Gubernur juga diberi kekuasaan untuk menunjuk pejabat lokal dan memimpin pasukan militer di provinsinya, namun tidak boleh bertindak bertentangan dengan kebijakan pusat. Dalam praktiknya, beberapa gubernur seperti di wilayah Khurasan atau Mesir menjadi sangat berpengaruh, bahkan kadang menimbulkan potensi konflik atau pemberontakan apabila merasa tidak puas terhadap pemerintahan pusat.¹⁸ Oleh karena itu, sistem ini meski efektif secara administratif, tetap menyimpan potensi ketegangan vertikal antara pusat dan daerah.

Dominasi Elit Arab dan Ketimpangan Sosial

Pemerintahan Bani Umayyah kerap mendapat kritik dari sejarawan dan akademisi Muslim karena adanya dominasi elit Quraisy dan Arab dalam struktur pemerintahan. Praktik eksklusivisme ini tampak jelas dalam penempatan jabatan penting yang umumnya hanya diberikan kepada kaum Arab, khususnya dari kabilah Quraisy. Sementara itu, kelompok non-Arab (*mawālī*) yakni para mualaf dari kalangan Persia, Berber, dan lainnya meskipun telah memeluk Islam, seringkali tidak memperoleh perlakuan setara dalam bidang politik, ekonomi, maupun hukum.¹⁹ Diskriminasi terhadap *mawālī* ini menciptakan ketimpangan sosial dan kecemburuan antarkelompok etnis dalam masyarakat Islam awal. Perlakuan yang tidak adil ini bertentangan dengan nilai-nilai egalitarian dalam ajaran Islam yang menekankan kesetaraan di hadapan

¹⁶Anisha Febrianti et al., "Sejarah Islam Masa Dinasti Umayyah : Berdirinya , Pola Pemerintahan , Ekspansi Wilayah , Dan Peradaban Islam" 8, no. 12 (2024): 193–204.

¹⁷Ira M. Lapidus, "A History of Islamic Societies," *Cambridge University Press*, 2014.

¹⁸Febrianti et al., "Sejarah Islam Masa Dinasti Umayyah : Berdirinya , Pola Pemerintahan , Ekspansi Wilayah , Dan Peradaban Islam."

¹⁹M.Ag. Dr. Musyarif, *Sejarah Peradaban Islam*, ed. M.Pd.I Dr. Ahdar, S.Ag, S.Sos (Jakarta: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019).

Allah Swt..²⁰ Ketegangan sosial ini kemudian memicu munculnya gerakan-gerakan oposisi, baik dari kalangan yang merasa termarginalkan secara struktural maupun dari kelompok ideologis seperti Syiah, yang sejak awal menentang legitimasi kekuasaan Umayyah atas dasar kekhalifahan tidak diwariskan kepada Ahlul Bait.

Salah satu bentuk oposisi paling kuat berasal dari pendukung Bani Abbasiyah, yang dengan cermat memanfaatkan ketidakpuasan kelompok mawali dan ketegangan antar-etnis sebagai landasan gerakan revolusioner. Narasi anti-diskriminasi dan pembelaan terhadap keturunan Nabi dijadikan alat propaganda untuk menggulingkan Umayyah.²¹ Pada akhirnya, ketidakadilan sosial yang dibiarkan terus berlangsung di era Umayyah menjadi salah satu sebab utama kejatuhan dinasti ini dan lahirnya kekhalifahan Abbasiyah yang menjanjikan tatanan masyarakat Islam yang lebih inklusif.

Islamisasi dan Arabisasi

Islamisasi dan Arabisasi merupakan dua kebijakan utama Dinasti Umayyah dalam memperkuat kekuasaan politik sekaligus memperluas pengaruh agama dan budaya. Dinasti ini tidak hanya fokus pada ekspansi wilayah, tetapi juga membangun kesatuan sosial dan kultural di antara berbagai etnis dan bangsa yang berada dalam kekuasaannya.²² Melalui strategi sistematis, proses penyebaran agama Islam dan budaya Arab menjadi fondasi penting yang diwariskan kepada peradaban Islam berikutnya.

Islamisasi adalah proses penyebaran ajaran dan nilai-nilai Islam ke masyarakat di wilayah kekuasaan Islam. Ini melibatkan dakwah, pendidikan Islam, pembangunan masjid, dan penerapan hukum-hukum syariah dalam kehidupan Masyarakat. Sedangkan Arabisasi adalah proses adopsi bahasa Arab dan unsur budaya Arab, terutama dalam urusan administrasi pemerintahan, pendidikan, dan komunikasi resmi. Tujuannya untuk menciptakan kesatuan budaya dan memperkuat otoritas pusat yang berbasis di Damaskus.

Salah satu tokoh penting dalam pelaksanaan Arabisasi adalah Khalifah Abdul Malik bin Marwan (685–705 M). Di bawah

²⁰Wati and Amril, "Dinamika Politik, Ekonomi, Dan Administrasi Dinasti Umayyah."

²¹Afrizal and Sawaluddin, "Bani Umayyah: Kemajuan Politik, Ekonomi, Administrasi, Kemunduran Dan Kehancuran," *Tarbawai Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Islam* 11(1) (2024).

²²Dr. Musyarif, *Sej. Perad. Islam*.

kepemimpinannya, ia melakukan beberapa pembaharuan untuk memperlancar administrasi pemerintahan.²³ Di antaranya adalah bahasa resmi pemerintahan diubah dari bahasa Yunani dan Persia menjadi bahasa Arab. Kebijakan ini dikeluarkan karena bahasa yang dipakai untuk kegiatan administrasi pemerintahan di daerah itu pada masa-masa sebelumnya, bukan bahasa Arab. Seperti diketahui bahwa pada masa Nabi dan para sahabat dan masa-masa awal dinasti Umayyah seluruh dokumen yang berkaitan dengan perikehidupan dicatat dalam bahasa Arab. Setelah bangsa Persia, Syiria dan Mesir bergabung dalam kekuasaan pemerintahan Islam, Khalifah Umar bin Al-Khatab mempertahankan dokumen yang berkaitan dengan negeri tersebut tetap dicatat dalam bahasa mereka masing-masing. Akibatnya, departemen keuangan negeri-negeri tersebut dikuasai oleh pribumi non muslim yang memahami bahasa mereka

Kebijakan kedua yang dikeluarkan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan (685–705 M) adalah mata uang Islam (dinar dan dirham) dicetak menggunakan aksara Arab dan simbol Islam. Mata uang ini terbuat dari emas (Dinar), perak (Dirham) dan perunggu (Falsatau Fuls), mata uang yang satu sisinya bertuliskan kalimat “Laailaha Illallah” dan sisi lainnya tertulis nama khalifah. Mata uang Islam yang baru ini menghilangkan simbolis Kristen dan Zoroaster. Untuk kepentingan itu, khalifah Abdul malik bin Marwan mendirikan pabrik percetakan uang di Damaskus.²⁴

Selanjutnya, Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengeluarkan kebijakan ketiga yaitu administrasi negara diseragamkan agar seluruh wilayah kekuasaan tunduk pada satu sistem. Tujuan utama dari kebijakan ini adalah agar seluruh wilayah kekuasaan Islam, yang membentang dari Afrika Utara hingga Asia Tengah, tunduk pada satu sistem pemerintahan yang seragam dan terpusat. Kebijakan ini meliputi penggantian bahasa resmi administrasi dari Yunani, Persia, dan Koptik menjadi bahasa Arab, serta penyeragaman dalam hal penulisan dokumen, pajak, dan sistem pengarsipan negara. Dengan demikian, bahasa Arab tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi religius, tetapi juga sebagai simbol kekuasaan dan alat pemersatu politik di bawah dinasti Umayyah.²⁵ Kebijakan ini memperkuat otoritas pusat dan

²³M.A. Dr. H. Anwar Sewang, *Sejarah Peradaban Islam*, 2017.

²⁴Nuryati et al., “Membangun Peradapan Peran Dinasti Bani Umayyah Dalam Pembentukan Sejarah Awal Islam.”

²⁵Surma Hayani and Nurhasanah Bakhtiar, “Arabisasi Pemerintahan Islam Pada Masa Khalifah Abdul Malik Bin Marwan,” *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 3, no. 2 (2020): 204, <https://doi.org/10.30829/juspi.v3i2.6509>.

menegaskan supremasi identitas Arab-Islam di tengah keragaman etnik dan budaya wilayah taklukan. Dalam konteks sejarah, langkah ini merupakan bagian dari proses Arabisasi pemerintahan, yang tidak hanya berdampak pada sistem administrasi, tetapi juga memberi pengaruh besar terhadap dinamika sosial dan budaya masyarakat Islam pada masa itu.

Kebijakan keempat yang dikeluarkan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan yakni didirikannya sistem pos dan intelijen negara yang efisien berbasis penggunaan bahasa Arab. Kebijakan keempat yang dikeluarkan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan yakni didirikannya sistem pos dan intelijen negara yang efisien berbasis penggunaan bahasa Arab. Sistem pos ini tidak sekadar digunakan untuk mengirimkan surat dan dokumen resmi pemerintahan, melainkan juga berfungsi sebagai instrumen strategis dalam mengontrol wilayah kekuasaan, menyampaikan perintah khalifah, serta mengumpulkan informasi intelijen dari berbagai pelosok kekhalifahan. Dengan memusatkan komunikasi administratif menggunakan bahasa Arab, sistem ini mampu mempercepat sirkulasi informasi politik dan administratif, sekaligus memperkuat konsolidasi kekuasaan pusat atas daerah-daerah yang jauh dari Damaskus.²⁶ Selain itu, pendirian sistem pos dan intelijen juga menunjukkan kematangan administrasi Dinasti Umayyah, karena menggabungkan unsur efisiensi birokrasi dengan kepentingan keamanan negara. Surat-surat pemerintahan dikirim secara teratur melalui jalur pos resmi yang melewati berbagai titik strategis, seperti kota besar dan benteng militer. Di setiap pos, tersedia para kurir profesional dan pengawas administratif yang memastikan akurasi dan kerahasiaan pesan, serta menindaklanjuti perintah dari pusat.²⁷ Keberadaan sistem ini menjadi bukti bahwa Dinasti Umayyah telah memiliki perangkat negara modern dalam konteks abad ke-7, yang setara dengan birokrasi Kekaisaran Romawi dan Persia, tetapi dengan sentuhan Islam dan bahasa Arab sebagai basis utamanya. Langkah-langkah ini memperkuat peran bahasa Arab sebagai simbol kekuasaan dan identitas Islam.

Islamisasi pada masa Dinasti Umayyah membawa perubahan signifikan dalam struktur sosial masyarakat Islam. Banyak penduduk non-Arab yang dikenal sebagai *mawali* memeluk agama Islam karena tertarik pada ajaran universal Islam yang menekankan persamaan hak

²⁶M. R. Ridho, "Menelaah Sejarah Peradaban Islam Pada Masa Dinasti Umayyah," *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2(11) (2024): 595–98.

²⁷Afrizal and Sawaluddin, "Bani Umayyah: Kemajuan Politik, Ekonomi, Administrasi, Kemunduran Dan Kehancuran."

dan nilai spiritual yang egaliter.²⁸ Namun, dalam praktik pemerintahan Umayyah, *mawali* masih mengalami diskriminasi. Mereka belum memperoleh hak dan kedudukan politik maupun ekonomi yang setara dengan kaum Muslim Arab. Dalam sistem perpajakan, misalnya, mereka tetap dikenakan pajak *jizyah* meskipun telah masuk Islam, yang seharusnya hanya diberlakukan bagi non-Muslim.²⁹ Kendati demikian, semangat egalitarian dalam ajaran Islam mendorong munculnya desakan sosial dan keagamaan agar *mawali* diperlakukan setara. Desakan ini lambat laun memaksa perubahan kebijakan yang mempercepat proses integrasi sosial, sekaligus memperluas cakupan Islamisasi ke berbagai wilayah, seperti Asia Tengah, Afrika Utara, dan anak benua India. Dalam konteks ini, Islam tidak hanya hadir sebagai agama, tetapi juga sebagai peradaban transnasional yang menghubungkan masyarakat yang beragam latar belakang budaya dan etnis.³⁰

Di sisi lain, kebijakan Arabisasi yang dicanangkan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan berperan penting dalam membentuk fondasi peradaban Islam global. Penggunaan bahasa Arab sebagai bahasa administrasi, intelektual, dan keagamaan memperkuat identitas Islam sebagai satu entitas peradaban yang kohesif. Bahasa Arab kemudian berkembang menjadi *lingua franca* dunia Islam yang mengikat komunitas Muslim dari berbagai wilayah dan menjadi medium utama dalam pengembangan ilmu pengetahuan, filsafat, hukum, dan sastra.³¹ Proses Islamisasi dan Arabisasi ini telah menyatukan berbagai bangsa di bawah satu identitas keislaman kolektif, serta memperkuat kesadaran ummah sebagai komunitas global. Kebijakan tersebut menjadi warisan penting yang tidak hanya dilanjutkan, tetapi juga disempurnakan oleh Dinasti Abbasiyah dalam bentuk kemajuan ilmu pengetahuan, administrasi pemerintahan, dan kehidupan intelektual Islam.³²

Perluasan Wilayah Islam

Perluasan wilayah Islam pada masa Dinasti Umayyah merupakan salah satu pencapaian luar biasa dalam sejarah peradaban Islam. Di bawah pemerintahan dinasti ini, wilayah kekuasaan Islam berkembang

²⁸Dr. H. Anwar Sewang, *Sej. Perad. Islam*.

²⁹Lapidus, "A History of Islamic Societies."

³⁰Ridho, "Menelaah Sejarah Peradaban Islam Pada Masa Dinasti Umayyah."

³¹Hayani and Bakhtiar, "Arabisasi Pemerintahan Islam Pada Masa Khalifah Abdul Malik Bin Marwan."

³²Afrizal and Sawaluddin, "Bani Umayyah: Kemajuan Politik, Ekonomi, Administrasi, Kemunduran Dan Kehancuran."

pesat, mencakup tiga benua: Asia, Afrika, dan Eropa. Pencapaian ini menjadikan Dinasti Umayyah sebagai salah satu kekaisaran terluas pada zamannya, yang tidak hanya membawa pengaruh politik dan militer, tetapi juga agama dan budaya.³³

Beberapa faktor penting yang mendorong ekspansi ini antara lain:

1. Semangat dakwah Islam, menyebarkan ajaran tauhid ke berbagai penjuru dunia.
2. Motif politik dan militer, memperluas kekuasaan dan mengamankan perbatasan.
3. Kebutuhan ekonomi, mencari sumber daya baru dan jalur perdagangan.
4. Kelemahan Kekaisaran Romawi Timur dan Persia, yang memberikan peluang strategis bagi Umayyah untuk menaklukkan wilayah.

Berikut wilayah penting yang ditaklukkan:

1. Afrika Utara: Ditundukkan oleh Musa bin Nushair dan pasukannya.
2. Spanyol (Al-Andalus): Dimasuki melalui Gibraltar oleh Thariq bin Ziyad pada 711 M.
3. Asia Tengah: Termasuk wilayah Transoxiana, seperti Samarkand dan Bukhara.
4. Sindh dan Punjab (India): Ditaklukkan oleh Muhammad bin Qasim sekitar 712 M.
5. Kawasan Kaukasus dan Perancis Selatan: Ekspedisi sampai ke Tours, meskipun dikalahkan pada 732 M dalam Pertempuran Tours oleh pasukan Franka.

Dinasti Umayyah menggunakan strategi militer yang efektif, termasuk penaklukan cepat, pengiriman jenderal-jenderal berbakat, dan pendekatan diplomatik. Mereka juga sering membuat perjanjian damai dengan penduduk lokal dan menawarkan perlindungan kepada non-Muslim sebagai *ahl al-dhimmah* dengan kewajiban membayar jizyah.³⁴

Adapun dampak dari adanya perluasan wilayah kekuasaan Dinasti Umayyah sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, dan pemerintahan dunia Islam. Pertama, perluasan ini mempercepat proses Islamisasi di berbagai wilayah seperti Asia Tengah, Afrika Utara, hingga Semenanjung Iberia di Eropa Barat. Islam tidak hanya menyebar sebagai agama, tetapi juga sebagai sistem nilai yang

³³Febrianti et al., "Sejarah Islam Masa Dinasti Umayyah: Berdirinya, Pola Pemerintahan, Ekspansi Wilayah, Dan Peradaban Islam."

³⁴Kennedy, "The Prophet and the Age of The Caliphates."

memengaruhi struktur sosial dan tata hukum masyarakat lokal.³⁵ Kedua, perluasan wilayah menciptakan perpaduan budaya antara budaya Arab dan budaya lokal yang menghasilkan transformasi peradaban Islam yang kosmopolit. Di kota-kota besar seperti Damaskus, Kairouan, dan Cordoba, terjadi perkembangan pesat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan arsitektur, termasuk integrasi tradisi Yunani, Persia, dan India ke dalam khazanah intelektual Islam. Interaksi ini memperkaya dinamika keilmuan yang pada akhirnya menjadi fondasi kejayaan intelektual di era Abbasiyah.³⁶ Ketiga, tantangan administratif menjadi konsekuensi logis dari cakupan kekuasaan yang sangat luas. Pemerintahan pusat di Damaskus harus membangun sistem birokrasi dan pengawasan yang kompleks, termasuk penunjukan gubernur, pendirian sistem pos, pengelolaan pajak, dan pembentukan lembaga diwan.³⁷ Namun, sistem ini juga kerap memicu konflik internal, terutama akibat perbedaan etnis, kesenjangan sosial antara Arab dan non-Arab, serta munculnya ambisi politik dari gubernur di provinsi yang jauh dari pusat kekuasaan.

Konflik Internal (Fitnah)

Dinasti Umayyah (661–750 M) adalah dinasti Islam pertama yang bersifat turun-temurun setelah masa Khulafaur Rasyidin. Meski berhasil memperluas wilayah Islam secara signifikan, masa pemerintahannya juga diwarnai oleh berbagai konflik internal, yang dalam sejarah Islam dikenal sebagai *fitnah*. Fitnah dalam konteks ini merujuk pada perang saudara, pemberontakan politik, dan krisis legitimasi yang mengguncang stabilitas kekhalifahan.

Fitnah kedua merupakan konflik internal terbesar yang terjadi di masa awal pemerintahan Bani Umayyah. Peristiwa ini dimulai pasca wafatnya Muawiyah bin Abu Sufyan dan naiknya anaknya, Yazid bin Muawiyah, sebagai khalifah. Penunjukan ini mendapat penolakan dari banyak pihak karena dianggap tidak sah menurut tradisi musyawarah Islam.³⁸

Beberapa peristiwa besar dalam Fitnah Kedua adalah sebagai berikut.

1. Tragedi Karbala (680 M): Husain bin Ali, cucu Nabi Muhammad, dibunuh bersama keluarganya oleh pasukan Yazid. Tragedi ini

³⁵Febrianti et al., “Sejarah Islam Masa Dinasti Umayyah : Berdirinya , Pola Pemerintahan , Ekspansi Wilayah , Dan Peradaban Islam.”

³⁶Ridho, “Menelaah Sejarah Peradaban Islam Pada Masa Dinasti Umayyah.”

³⁷Wati and Amril, “Dinamika Politik, Ekonomi, Dan Administrasi Dinasti Umayyah.”

³⁸Marshall G.S. Hodgson, “The Venture of Islam,” *University of Chicago*, 1974.

menjadi simbol ketidakadilan dan menjadi titik awal konflik Sunni-Syiah.

2. Pemberontakan Abdullah bin Zubair (683–692 M): Mengangkat dirinya sebagai khalifah di Makkah setelah kematian Yazid. Konflik ini berakhir ketika Khalifah Abdul Malik bin Marwan mengalahkannya pada 692 M.
3. Pemberontakan kaum Khawarij: Mereka menolak kedua pihak dan membentuk kelompok tersendiri, sering melakukan aksi militan terhadap pemerintahan pusat.

Setelah Fitnah Kedua, Dinasti Umayyah berusaha menstabilkan pemerintahan melalui sistem monarki turun-temurun. Namun, sistem ini menimbulkan ketegangan antara keluarga Umayyah sendiri dan keturunan Bani Hasyim (termasuk keturunan Ali bin Abi Thalib). Banyak pemberontakan muncul dari golongan Syiah, Khawarij, dan kelompok Mawali (non-Arab Muslim) yang merasa terpinggirkan³⁹.

Konflik internal tidak hanya terjadi karena faktor politik, tetapi juga ketidakadilan sosial, diantaranya: (1) diskriminasi terhadap mawali, yakni Muslim non-Arab, terutama dalam distribusi harta dan jabatan, (2) ketimpangan ekonomi antara pusat kekhalifahan (Damaskus) dan wilayah-wilayah pinggiran, dan (3) Penggunaan kekuatan militer dan kekerasan dalam menekan oposisi politik. Puncak dari konflik internal terjadi pada pertengahan abad ke-8 M ketika muncul pemberontakan Abbasiyah, yang didukung oleh keturunan Bani Hasyim dan kaum Mawali. Pada 750 M, Dinasti Umayyah runtuh setelah kekalahan Khalifah Marwan II dalam Pertempuran Zab. Kekuasaan kemudian berpindah ke tangan Dinasti Abbasiyah yang berpusat di Baghdad.

Pusat Kebudayaan di Damaskus

Setelah Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan mendirikan Dinasti Umayyah pada tahun 661 M, ia menjadikan Damaskus sebagai ibu kota kekhalifahan Islam. Di bawah pemerintahan Umayyah, Damaskus berkembang menjadi pusat politik, militer, dan terutama kebudayaan Islam yang pertama kali bersifat imperium.⁴⁰ Kota ini menjadi tempat bertemunya berbagai unsur kebudayaan Arab, Persia, Romawi, dan Bizantium yang memperkaya khasanah peradaban Islam klasik. Damaskus memainkan peran sentral dalam perkembangan administrasi, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan Islam awal. Beberapa ciri

³⁹Hodgson.

⁴⁰Lapidus, "A History of Islamic Societies."

kebudayaan yang berkembang di Damaskus pada masa ini antara lain sebagai berikut.⁴¹

1. Birokrasi terorganisasi: Diadopsi dari sistem Bizantium dan Persia, dengan bahasa Arab sebagai alat komunikasi resmi (sejak era Abdul Malik bin Marwan).
2. Arsitektur monumental: Termasuk pembangunan Masjid Umayyah yang menjadi ikon arsitektur Islam klasik.
3. Penyusunan hukum Islam awal: Meskipun belum tersusun sistematis seperti pada masa Abbasiyah, era Umayyah adalah masa awal pembentukan sistem hukum fiqh secara lisan.
4. Munculnya sarjana awal: Termasuk ahli tafsir, hadis, dan sejarah yang kemudian berkembang lebih pesat di masa berikutnya.

Salah satu bukti nyata perkembangan budaya dan arsitektur di Damaskus adalah pembangunan Masjid Umayyah (Masjid Agung Damaskus) oleh Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Masjid ini bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga menjadi pusat pendidikan, pertemuan politik, dan diskusi keagamaan. Arsitekturnya menggabungkan unsur Romawi dan Bizantium dengan gaya Islam yang khas, memperlihatkan interaksi budaya yang harmonis.

1. Budaya Damaskus pada masa Umayyah sangat dipengaruhi oleh keberagaman etnis dan budaya wilayah taklukan⁴²:
2. Seni rupa dan mosaik: Banyak bangunan dihiasi mosaik bergaya Bizantium namun mengandung tema keislaman.
3. Musik dan sastra: Berkembang pesat, khususnya syair-syair Arab klasik yang menjadi alat diplomasi dan propaganda politik.
4. Penerjemahan dan asimilasi ilmu: Meski lebih menonjol pada era Abbasiyah, awal gerakan translasi ilmu asing ke dalam bahasa Arab telah dimulai di Damaskus

Sebagai pusat kekuasaan dan kebudayaan, Damaskus mewariskan fondasi peradaban Islam yang kemudian dilanjutkan oleh Dinasti Abbasiyah. Warisan budaya ini meliputi sistem administrasi, seni bangunan, bahasa, serta integrasi budaya lokal ke dalam Islam. Peran Damaskus sebagai pelopor pusat kebudayaan memperlihatkan

⁴¹M. Afiquil Adib, "Memahami Pusat-Pusat Peradaban Islam Masa Pemerintahan Bani Umayyah Di Damaskus," *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2, no. 2 (2024): 2291-2303, <https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/163/232>.

⁴²Manshur, "Pertumbuhan Dan Perkembangan Budaya Arab Pada Masa Dinasti Umayyah."

bagaimana Islam bukan hanya agama spiritual, tetapi juga peradaban kosmopolitan.⁴³

Simpulan

Dinasti Umayyah menandai era penting dalam sejarah awal Islam yang ditandai dengan transformasi besar dalam struktur kekuasaan dan perkembangan kebudayaan. Perubahan dari sistem khilafah elektif menjadi monarki hereditas menciptakan sentralisasi pemerintahan dengan Damaskus sebagai pusat kendali politik dan budaya. Dalam konteks ini, kebijakan Arabisasi yang dijalankan terutama oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan memainkan peran strategis dalam menyatukan administrasi negara dan membentuk identitas bersama umat Islam melalui bahasa dan budaya.

Kebijakan Islamisasi turut memperluas pengaruh agama Islam ke berbagai wilayah, dari Spanyol hingga India. Meskipun pada awalnya menimbulkan ketimpangan sosial antara Muslim Arab dan non-Arab (mawali), dalam jangka panjang proses ini mempercepat integrasi sosial, pertumbuhan komunitas Islam lintas etnis, dan pembentukan tatanan masyarakat multikultural.

Damaskus sebagai ibu kota tidak hanya menjadi simbol kekuasaan, tetapi juga pusat peradaban Islam awal. Keberagaman budaya wilayah taklukan yang bertemu di Damaskus melahirkan inovasi dalam arsitektur, seni, dan ilmu pengetahuan. Dinasti Umayyah berhasil menciptakan fondasi politik dan budaya yang kokoh, yang kelak diwarisi dan dikembangkan oleh Dinasti Abbasiyah.

Dengan demikian, transformasi kekuasaan dan kebijakan kebudayaan di masa Bani Umayyah memiliki peran krusial dalam membentuk karakter awal peradaban Islam yang bersifat universal, inklusif, dan berorientasi kosmopolit.

Referensi

- Adib, M. Afiqu. "Memahami Pusat-Pusat Peradaban Islam Masa Pemerintahan Bani Umayyah Di Damaskus." *Jurnal Media Akademik (Jma)* 2, no. 2 (2024): 2291-2303.
<https://jurnal.mediaakademik.com/index.php/jma/article/view/163/232>.
- Afrizal, and Sawaluddin. "Bani Umayyah: Kemajuan Politik, Ekonomi, Administrasi, Kemunduran Dan Kehancuran." *Tarbawai Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan Islam* 11(1) (2024).
- Dr. H. Anwar Sewang, M.A. *Sejarah Peradaban Islam*, 2017.
- Dr. Musyarif, M.Ag. *Sejarah Peradaban Islam*. Edited by M.Pd.I Dr. Ahdar, S.Ag, S.Sos. Jakarta: CV. KAAFFAH LEARNING CENTER, 2019.

⁴³Lapidus, "A History of Islamic Societies."

- Dr. Siti Zubaidah, M.Ag. *Sejarah Peradaban Islam*. Edited by M.A Dr. Nurika Khalila Dauly. *Sejarah Peradaban Islam*. Vol. 1. PERDANA PUBLISHING, 2016.
- Febrianti, Anisha, Aline Andjani, Annatacyay Nayla Meisari, Farhandani Raendra, and Supian Ramli. "Sejarah Islam Masa Dinasti Umayyah : Berdirinya , Pola Pemerintahan , Ekspansi Wilayah , Dan Peradaban Islam" 8, no. 12 (2024): 193–204.
- Harahap, Muhammad Sapii. "Sejarah Dinasti Bani Umaiyah Dan Pendidikan Islam." *WARAQAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman* 4, no. 2 (2020): 21. <https://doi.org/10.51590/waraqat.v4i2.86>.
- Harahap, Saidatul Husna, Lutfi Ardiansyah Pasaribu, Kelvin Alvaro, Akbar Muhammad Silaen, and Lyona Beby. "Perkembangan Peradaban Islam Pada Dinasti Bani Umayyah." *Tabayyun* 2, no. 1 (2024): 184–99.
- Hasan, Hasan Ibrahim. *Sejarah Dan Kebudayaan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia, 2006.
- Hayani, Surma, and Nurhasanah Bakhtiar. "Arabisasi Pemerintahan Islam Pada Masa Khalifah Abdul Malik Bin Marwan." *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)* 3, no. 2 (2020): 204. <https://doi.org/10.30829/juspi.v3i2.6509>.
- Hodgson, Marshall G.S. "The Venture of Islam." *University of Chicago*, 1974.
- Kennedy, H. *The Prophet and the Age of the Caliphates: The Islamic Near East from the Sixth to the Eleventh Century*. Pearson Education, 2004.
- Kennedy, Hugh. "The Prophet and the Age of The Caliphates." *Pearson Education*, 2004.
- Lapidus, Ira M. "A History of Islamic Societies." *Cambridge University Press*, 2014.
- Manshur, fadil munawar. "Pertumbuhan Dan Perkembangan Budaya Arab Pada Masa Dinasti Umayyah." *Humaniora* 15, no. 2 (2022): 172–80. <https://journal.ugm.ac.id/jurnal-humaniora/article/view/785/630>.
- Nasution, Syah Ahmad Qudus Dalimunthe dan Syawaluddin. "Dinamika Spiritual Islam Pada Masa Dinasti Umayyah." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 2 (2023): 16466.
- Nuryati, Supian, Debi Alisa Putri, Dzalika Fidia Putri, and Devi Amara. "Membangun Peradaban Peran Dinasti Bani Umayyah Dalam Pembentukan Sejarah Awal Islam." *Jurnal Kajian Ilmiah Interdisipliner* 8, no. 12 (2024): 2118–7303.
- Ridho, M. R. "Menelaah Sejarah Peradaban Islam Pada Masa Dinasti Umayyah." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2(11) (2024): 595–98.
- Syari, Isma Aulia Zamaakh, and Meyniar Albina. "Multikulturalisme Pada Masa Dinasti Umayyah." *Jurnal Kajian Islam Dan Sosial Keagamaan* 2, no. 2 (2024): 244–48.
- Wati, L., and M. Amril. "Dinamika Politik, Ekonomi, Dan Administrasi Dinasti Umayyah." *Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, Dan Humaniora* 4(1) (2024): 1–15.